Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP
ANAK PELAKU TAWURAN DENGAN SENJATA TAJAM

(Studi: Putusan Participial 1989)

Dimas Muria Sholeh Saputro^{a*}

dimasmuria31@gmail.com

Vieta Imelda Cornelis^{b**}

vieta.cornelis11@gmail.com

Vallencia Nandya Paramitha^{c***}

vallencia@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Children who commit criminal offenses require special handling in the criminal justice system, given their status as immature individuals. In Indonesia, the handling of children as perpetrators of criminal acts, especially children as perpetrators of brawls with sharp weapons, is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (SPPA), which replaces Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. This study aims to a. Analyze the effectiveness of the Implementation of Law Number 11 of 2012 in Handling Child Perpetrators of Brawls b. Identify and understand the difficulties faced by law enforcement officials in tackling brawls whose perpetrators are children using sharp weapons. By using the Normative Juridical research method. The results of the study show that Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) emphasizes restorative justice and diversion to protect children from the negative impact of repressive justice and prevent repetition of criminal acts. However, its implementation faces challenges such as demands for severe punishment from the community, social stigma, limited rehabilitation facilities, and a lack of understanding by legal officials. To overcome this, it is recommended to increase the capacity of the apparatus, strengthen rehabilitation facilities, socialize with the community, and harmonize regulations. The Indonesian National Police (Polri), by Law Number 2 of 2002, is tasked with maintaining security, enforcing the law, and protecting and serving the community. In dealing with child brawls with sharp weapons, the National Police make pre-emptive efforts such as counseling and partnerships with educational institutions; preventive efforts through patrols and community development; and repressive efforts with law enforcement and confiscation of evidence. The obstacles faced include limited budget and personnel, lack of parental attention, less conducive school environment, and limited education budget. Cooperation between the police, educational institutions, parents, and communities is

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

needed to create an environment that supports children's positive development and prevents their involvement in criminal acts.

Keywords: *Crime, Police, Children, Brawl, Sharp Weapons*

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana, mengingat status mereka sebagai individu yang belum dewasa. Di Indonesia, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya anak sebagai pelaku Tawuran dengan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. penelitian ini bertujuan a. Menganalisis efektivitas Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penanganan Anak Pelaku Tawuran b. Mengidentifikasi dan memahami kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tawuran yang pelakunya seorang anak menggunakan senjata tajam. Dengan menggunakan Metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan keadilan restoratif dan diversifikasi untuk melindungi anak dari dampak negatif peradilan represif serta mencegah pengulangan tindak pidana. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti tuntutan hukuman berat dari masyarakat, stigma sosial, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya pemahaman aparat hukum. Untuk mengatasi hal ini, disarankan meningkatkan kapasitas aparat, memperkuat fasilitas rehabilitasi, sosialisasi ke masyarakat, dan harmonisasi regulasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Dalam menangani tawuran anak bersenjata tajam, Polri melakukan upaya pre-emptif seperti penyuluhan dan kemitraan dengan institusi pendidikan; upaya preventif melalui patroli dan pembinaan masyarakat; serta upaya represif dengan penegakan hukum dan penyitaan barang bukti. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan personel, kurangnya perhatian orang tua, lingkungan sekolah yang kurang kondusif, dan keterbatasan anggaran pendidikan. Kerja sama antara kepolisian, institusi pendidikan, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak dan mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kepolisian, Anak, Tawuran, Senjata Tajam

1. PENDAHULUAN

Anak yang melakukan tindak pidana memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana, mengingat status mereka sebagai individu yang belum dewasa.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Di Indonesia, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tawuran anak-anak di bawah umur merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Tindakan tawuran ini sering kali melibatkan penggunaan senjata tajam, yang dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Dalam upaya menanggulangi masalah ini, pemerintah Indonesia memiliki berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam dan senjata api.

Penting untuk memahami bagaimana implementasi undang-undang ini dapat memengaruhi tindakan hukum terhadap pelaku tawuran anak-anak, serta langkah-langkah yang diambil untuk mencegah tawuran dan melindungi anak-anak dari bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam konteks tawuran anak-anak di bawah umur yang menggunakan senjata tajam.

Tawuran di kalangan anak-anak sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk pergaulan, masalah pribadi, dan pengaruh lingkungan. Ketersediaan senjata tajam di kalangan anak-anak semakin memperburuk masalah ini. Menurut data dari kepolisian, tawuran yang melibatkan senjata tajam cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penggunaan senjata tajam dalam tawuran dapat menyebabkan luka serius, trauma, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk menangani masalah ini.

Tawuran di kalangan anak-anak dan remaja telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di banyak kota besar di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak yang serius terhadap keselamatan dan perkembangan mental anak-anak yang terlibat. Tawuran yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

melibatkan penggunaan senjata tajam oleh anak-anak di bawah umur semakin memperparah situasi, karena selain menimbulkan luka fisik yang serius, tindakan ini juga berpotensi mengakibatkan kematian.

Dalam konteks hukum, anak-anak di bawah umur berada dalam perlindungan hukum khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan pendekatan restoratif bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, meskipun regulasi sudah ada, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus tawuran anak di bawah umur yang menggunakan senjata tajam berujung pada penjatuhan hukuman pidana, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi atau pemulihan yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari UU SPPA.

Selain itu, peran masyarakat, keluarga, dan lingkungan sosial dalam mencegah dan menangani fenomena ini juga sering kali diabaikan. Anak-anak yang terlibat dalam tawuran sering kali berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis atau lingkungan yang rawan kriminalitas. Kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya akses pendidikan yang memadai, serta pengaruh negatif dari pergaulan menjadi faktor pemicu utama yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam tindakan kekerasan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana implementasi undang-undang terhadap pelaku tawuran anak-anak di bawah umur yang menggunakan senjata tajam, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kejahatan ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak di bawah umur, sekaligus mengurangi tingkat keterlibatan mereka dalam tindakan tawuran.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam menangani kasus tawuran anak di bawah umur, serta memastikan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bahwa hukum yang ada mampu memberikan keadilan dan perlindungan yang proporsional bagi anak-anak yang terlibat dalam tindakan kekerasan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter 2010:93). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber referensinya dari buku-buku ilmu hukum, jurnal dan literatur yang relevan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji 2001:13). Telaah yang digunakan untuk menguraikan objek penelitian pada dasarnya didasarkan Pada observasi kritis dan rinci terhadap problematika hukum yang terjadi sekarang ini.

3. PEMBAHASAN

Efektifitas Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tawuran Bersenjata Tajam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan instrumen hukum yang mengatur perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu pendekatan utama yang diatur dalam UU SPPA adalah penerapan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi. Kedua prinsip ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk sistem peradilan pidana yang terlalu represif. Dalam konteks tawuran yang melibatkan anak-anak di bawah umur, undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah pengulangan perilaku serupa di masa depan (Harsono, 2021).

Namun, efektivitas implementasi UU SPPA sering menjadi bahan diskusi, terutama dalam kasus yang melibatkan senjata tajam. Tawuran merupakan bentuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kekerasan kolektif yang kerap dianggap sebagai ancaman serius oleh masyarakat. Dalam hal ini, hukum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan tetapi juga mampu memberikan efek jera kepada pelaku tanpa melanggar hak-hak anak sebagai individu dalam masa perkembangan (Rahman, 2021).

UU SPPA secara eksplisit mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan non-represif. Dalam mekanisme ini, pelaku, korban, dan masyarakat diajak untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Prinsip ini lebih menekankan pada upaya pemulihan daripada hukuman, sehingga relevan untuk diterapkan dalam kasus tawuran anak-anak (Putri et al., 2020). Efektivitas keadilan restoratif diukur dari kemampuan sistem hukum untuk menghindarkan anak dari stigma sosial. Tawuran sering kali melibatkan anak-anak sebagai pelaku, baik secara aktif maupun pasif, sehingga penerapan mekanisme diversi dianggap sebagai langkah tepat untuk menangani kasus ini. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, diversi dapat diterapkan jika ancaman hukuman tidak lebih dari tujuh tahun dan anak tidak mengulangi tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, penggunaan senjata tajam dalam tawuran sering kali dianggap sebagai tindak pidana serius yang menyulitkan penerapan mekanisme ini (Setiawan, 2019).

Meski prinsip keadilan restoratif memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif sering kali menjadi penghambat utama. Beberapa aparat lebih mengutamakan pendekatan represif dibandingkan pendekatan yang mendidik. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak yang terlibat dalam tawuran kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi yang memadai (Widiastuti, 2020). Kedua, terdapat keterbatasan fasilitas rehabilitasi untuk anak pelaku tawuran. Menurut data dari Kementerian Sosial, tidak semua daerah memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mampu memberikan pembinaan dan rehabilitasi secara efektif. Akibatnya, anak-anak yang berhadapan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dengan hukum sering kali ditempatkan bersama narapidana dewasa, yang dapat memperburuk perilaku mereka (Prasetyo & Kurnia, 2022).

Ketiga, tekanan dari masyarakat untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku tawuran sering kali memengaruhi proses peradilan. Masyarakat umumnya mengharapkan hukuman yang bersifat represif untuk memberikan efek jera, terutama dalam kasus yang melibatkan senjata tajam. Padahal, pendekatan ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA (Rahman, 2021). Salah satu acuan penting dalam implementasi keadilan restoratif adalah Putusan Participial 1989, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dibandingkan hukuman dalam penanganan kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Putusan ini menjadi landasan dalam mengembangkan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks UU SPPA, prinsip ini diterjemahkan melalui mekanisme diversi dan program pembinaan.

Namun, penerapan Putusan Participial 1989 dalam kasus tawuran anak-anak di Indonesia masih menghadapi kendala budaya hukum yang cenderung represif. Dalam beberapa kasus, pendekatan hukum lebih mengutamakan hukuman penjara dibandingkan rehabilitasi, yang justru dapat meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Sebaliknya, kasus yang berhasil menerapkan prinsip rehabilitasi menunjukkan hasil yang lebih positif, di mana anak-anak dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat tanpa stigma (Setiawan, 2019). Diversi merupakan salah satu mekanisme utama dalam UU SPPA yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus anak-anak di luar sistem peradilan formal. Dalam kasus tawuran, diversi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga mengurangi risiko pengulangan tawuran di masa depan (Putri et al., 2020).

Namun, keberhasilan diversi sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapat dukungan penuh dari lingkungan sosial mereka

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

cenderung lebih berhasil dalam program rehabilitasi. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mendapat dukungan sering kali kembali terlibat dalam perilaku kekerasan (Harsono, 2021). Efektivitas UU SPPA dapat dievaluasi dari tiga aspek utama: pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dari sisi pencegahan, keberadaan UU ini berhasil mengurangi penggunaan pendekatan represif dalam penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, untuk kasus tawuran yang melibatkan senjata tajam, pencegahan belum sepenuhnya efektif karena kurangnya sosialisasi tentang bahaya penggunaan senjata tajam di kalangan anak-anak (Rahman, 2021).

Dalam aspek rehabilitasi, keberhasilan UU SPPA tergantung pada ketersediaan fasilitas dan program pembinaan yang memadai. Sayangnya, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia sering kali menjadi hambatan utama dalam memberikan rehabilitasi yang berkualitas (Widiastuti, 2020). Sementara itu, dalam hal reintegrasi sosial, anak-anak yang menjalani program rehabilitasi sering kali menghadapi stigma dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas UU SPPA tidak hanya bergantung pada implementasi hukum tetapi juga pada perubahan persepsi masyarakat terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (Prasetyo & Kurnia, 2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan peraturan yang dirancang untuk menangani kasus hukum yang melibatkan anak di bawah umur. UU ini berlandaskan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus membina anak yang berhadapan dengan hukum (Harsono, 2021). Namun, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi UU SPPA menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus anak-anak yang terlibat dalam tawuran menggunakan senjata tajam.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU SPPA adalah persepsi masyarakat yang cenderung menuntut hukuman berat bagi pelaku kejahatan, termasuk anak-anak. Dalam kasus tawuran yang melibatkan senjata tajam, masyarakat sering kali menganggap pelaku harus dihukum secara tegas tanpa memandang usia mereka. Hal ini

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bertentangan dengan prinsip utama UU SPPA yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan diversifikasi (Prasetyo & Kurnia, 2022). Stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam tawuran juga menjadi hambatan serius. Setelah menjalani proses hukum, anak-anak sering kali sulit untuk diterima kembali di masyarakat. Hal ini mengurangi efektivitas reintegrasi sosial yang menjadi salah satu tujuan utama UU SPPA. Penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial dapat meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana karena anak-anak merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar (Rahman, 2021).

Pelaksanaan UU SPPA juga terkendala oleh minimnya fasilitas yang mendukung rehabilitasi anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang menjadi tempat pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana, masih terbatas jumlahnya. Selain itu, beberapa LPKA belum memiliki program pembinaan yang dirancang khusus untuk menangani kasus kekerasan kolektif seperti tawuran (Widiastuti, 2020). Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar. Banyak aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, belum sepenuhnya memahami atau mendukung penerapan keadilan restoratif. Akibatnya, proses peradilan anak masih sering dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti pada orang dewasa, yang justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak (Harsono, 2021).

Diversifikasi adalah salah satu mekanisme utama yang diatur dalam UU SPPA untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal. Namun, penerapan diversifikasi sering kali terkendala oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah persepsi bahwa kasus tawuran yang melibatkan senjata tajam merupakan tindak pidana berat yang tidak layak untuk diversifikasi. Hal ini menyebabkan anak-anak pelaku tawuran lebih sering diproses secara formal melalui pengadilan, yang bertentangan dengan tujuan utama UU SPPA (Putri et al., 2020). Selain itu, keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, korban, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, kurangnya kerja sama dari pihak-pihak tersebut menjadi hambatan dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menyelesaikan konflik secara restoratif. Penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus tawuran, korban atau keluarga korban menolak menyelesaikan konflik melalui diversi karena menganggap hukuman berat adalah satu-satunya cara untuk memberikan keadilan (Setiawan, 2019).

Aparat penegak hukum sering kali menghadapi tekanan dari masyarakat atau media untuk memberikan hukuman berat kepada anak pelaku tawuran. Dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, aparat sering kali terpaksa mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif demi memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini mengurangi efektivitas UU SPPA dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (Rahman, 2021). Selain itu, intervensi politik juga dapat memengaruhi proses peradilan anak. Dalam beberapa kasus, pejabat daerah atau pemimpin politik tertentu ikut campur dalam penanganan kasus anak pelaku tawuran untuk menjaga citra mereka di mata masyarakat. Intervensi semacam ini sering kali mengarah pada keputusan yang tidak mendukung rehabilitasi anak (Widiastuti, 2020).

Meskipun UU SPPA telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan UU ini. Selain itu, kurangnya pelatihan dan panduan operasional untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif sering kali menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di antara aparat penegak hukum (Prasetyo & Kurnia, 2022). Kesenjangan ini juga terlihat dalam kurangnya harmonisasi antara UU SPPA dan peraturan daerah. Beberapa daerah masih mengadopsi peraturan lokal yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, seperti peraturan yang mewajibkan hukuman fisik bagi pelaku tawuran (Harsono, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan UU SPPA membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Putusan Participial 1989 menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip-prinsip dalam putusan ini sangat relevan dengan UU SPPA, terutama dalam penerapan keadilan restoratif dan diversi. Namun, studi menunjukkan bahwa banyak aparat penegak hukum di Indonesia belum menjadikan putusan ini sebagai acuan dalam menangani kasus anak pelaku tawuran (Setiawan, 2019). Dalam konteks tawuran yang melibatkan senjata tajam, Putusan Participial 1989 menggarisbawahi pentingnya memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui rehabilitasi daripada penghukuman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar UU SPPA, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh resistensi budaya hukum yang masih cenderung represif (Putri et al., 2020).

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi UU SPPA, beberapa langkah berikut dapat diambil:

- a. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Pelatihan intensif tentang keadilan restoratif dan diversi harus diberikan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap UU SPPA (Harsono, 2021).
- b. Penguatan Fasilitas Rehabilitasi: Pemerintah harus meningkatkan jumlah dan kualitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar mampu memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak (Widiastuti, 2020).
- c. Sosialisasi kepada Masyarakat: Kampanye edukasi tentang prinsip keadilan restoratif perlu dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat tentang anak yang berhadapan dengan hukum (Prasetyo & Kurnia, 2022).
- d. Harmonisasi Regulasi: Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua peraturan daerah sejalan dengan prinsip-prinsip UU SPPA (Setiawan, 2019).

Putusan Participial 1989 merupakan salah satu tonggak dalam pengembangan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Putusan ini menekankan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya diperlakukan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi dan perlindungan. Dalam konteks ini, pendekatan hukuman tidak lagi bersifat retributif melainkan korektif, dengan fokus pada rehabilitasi sosial dan penghindaran hukuman fisik yang merusak perkembangan anak (Harsono, 2021).

Kendala yang Dihadapi Aparat Kepolisian dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tawuran Bersenjata Tajam

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas utama Polri meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat: Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia, termasuk melakukan pengendalian massa, patroli, dan pengamanan kegiatan masyarakat serta pemerintah.
- b. Menegakkan hukum: Polri berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk identifikasi forensik, operasi medis kepolisian, dan laboratorium forensik, guna menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat: Polri menyediakan layanan seperti penerimaan laporan dan pengaduan, pengaturan lalu lintas, pengembangan kesadaran hukum masyarakat, serta bantuan dan pertolongan dalam situasi darurat untuk melindungi hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Polri memiliki wewenang untuk:

- a. Melakukan pengendalian, penjagaan, pengawalan, dan patroli: Polri melakukan kegiatan ini untuk menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas, serta menjaga ketertiban umum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- b. Mengembangkan kesadaran hukum masyarakat: Polri berperan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan: Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Melakukan identifikasi forensik: Polri melaksanakan operasi medis kepolisian, psikologi, dan laboratorium forensik untuk kepentingan tugas kepolisian.
- e. Memberikan izin dan sertifikat: Polri berwenang mengeluarkan izin dan sertifikat yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat, seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- f. Memberikan bantuan pengamanan: Polri memberikan bantuan pengamanan dalam persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat yang memerlukan pengamanan.

Dengan menjalankan tugas dan wewenang tersebut, Polri berperan penting dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Dalam menangani tawuran yang melibatkan anak-anak dengan senjata tajam, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas dan wewenang yang spesifik, yang meliputi:

a. Upaya Pre-emptif

- 1) Penyuluhan dan Edukasi: Polri melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya tawuran dan penggunaan senjata tajam. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran siswa tentang konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan tersebut.
- 2) Kemitraan dengan Institusi Pendidikan: Polri menjalin kerja sama dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta mencegah terjadinya tawuran.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Upaya Preventif

- 1) Patroli dan Pengawasan: Polri meningkatkan patroli di area rawan tawuran, terutama di sekitar sekolah dan tempat berkumpulnya remaja, untuk mencegah terjadinya konflik.
- 2) Pembinaan Masyarakat: Melalui unit Binmas dan Bhabinkamtibmas, Polri membangun hubungan positif dengan masyarakat, memberikan pendampingan, dan melaksanakan kegiatan preventif untuk mencegah kenakalan remaja.

c. Upaya Represif

- 1) Penegakan Hukum: Polri melakukan tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam tawuran dengan senjata tajam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Penyitaan Barang Bukti: Dalam kasus tawuran yang melibatkan senjata tajam, Polri berwenang menyita barang bukti seperti celurit, parang, atau pedang panjang untuk mencegah penggunaan lebih lanjut.

Dengan menjalankan tugas dan wewenang tersebut, Polri berperan penting dalam mencegah dan menangani tawuran yang melibatkan anak-anak dengan senjata tajam, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanganan anak sebagai pelaku tawuran yang melibatkan senjata tajam menghadirkan berbagai kendala bagi aparat kepolisian. Kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal:

a. Faktor Internal

Keterbatasan Anggaran dan Personel: Keterbatasan anggaran menghambat penyediaan peralatan yang diperlukan untuk menangani massa saat tawuran, serta mengurangi efektivitas operasi lapangan. Selain itu, jumlah personel yang terbatas menyulitkan pengendalian dan pembubaran massa tawuran, sehingga mempengaruhi respons kepolisian dalam situasi darurat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya Perhatian Orang Tua: Ketiadaan perhatian yang memadai dari orang tua menyebabkan anak-anak terlibat dalam kenakalan remaja, termasuk tawuran. Ini menekankan perlunya keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan dan pengawasan anak.
- 2) Lingkungan Sekolah dan Pergaulan Bebas: Lingkungan sekolah yang tidak sehat, termasuk pergaulan bebas, berkontribusi pada meningkatnya kasus tawuran. Program-program pendidikan dan pencegahan di sekolah harus diperkuat untuk mengurangi risiko terjadinya tawuran.
- 3) Keterbatasan Anggaran Pendidikan: Kurangnya alokasi anggaran dana yang memadai untuk perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan tawuran pelajar dapat menghambat efektivitas upaya pencegahan.

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan kerja sama antara kepolisian, institusi pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak dan mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal seperti tawuran bersenjata tajam.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi. Pendekatan ini bertujuan melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan yang terlalu represif, serta mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. Namun, implementasi UU SPPA menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus tawuran yang melibatkan senjata tajam. Masyarakat sering menuntut hukuman berat bagi pelaku, termasuk anak-anak, yang bertentangan dengan prinsip rehabilitasi dan diversifikasi dalam UU SPPA. Selain

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

itu, stigma sosial terhadap anak pelaku tawuran menyulitkan proses reintegrasi mereka ke masyarakat, meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang keadilan restoratif juga menghambat pelaksanaan UU SPPA. Mekanisme diversifikasi sering terhambat oleh anggapan bahwa penggunaan senjata tajam merupakan tindak pidana berat yang tidak layak untuk diversifikasi, serta kurangnya dukungan dari keluarga, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik secara restoratif. Tekanan masyarakat dan media untuk memberikan hukuman berat, serta intervensi politik, dapat memengaruhi proses peradilan anak, mengurangi efektivitas UU SPPA dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Kurangnya pelatihan dan panduan operasional bagi aparat penegak hukum, serta ketidakharmonisan antara UU SPPA dan peraturan daerah, menunjukkan perlunya koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Putusan Partisipial 1989 menekankan pendekatan rehabilitatif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA. Namun, resistensi budaya hukum yang cenderung represif menghambat penerapan pendekatan ini.

Saran

- a. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Memberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan kepada aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten sesuai dengan UU SPPA.
- b. Penguatan Fasilitas Rehabilitasi: Meningkatkan jumlah dan kualitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk memastikan anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi yang memadai. Fasilitas yang memadai akan mendukung proses reintegrasi anak ke masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- c. Sosialisasi kepada Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi secara masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif dan pentingnya rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana. Edukasi ini dapat mengurangi stigma sosial dan mendukung proses reintegrasi anak ke lingkungan sosialnya.
- d. Harmonisasi Regulasi: Memastikan keselarasan antara peraturan daerah dan UU SPPA melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik regulasi yang dapat menghambat penerapan keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi.
- e. Pelibatan Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Diversifikasi: Mendorong partisipasi aktif keluarga, korban, dan masyarakat dalam proses diversifikasi untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak. Pelibatan ini dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik secara restoratif.
- f. Penyediaan Panduan Operasional bagi Aparat Penegak Hukum: Menyusun dan mendistribusikan panduan operasional yang jelas mengenai penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi untuk memastikan keseragaman dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
- g. Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga: Meningkatkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan penerapan UU SPPA berjalan efektif dan efisien. Kerja sama yang baik antar lembaga akan mendukung proses peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Data dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang kasus tawuran anak di bawah umur (2022).
- Dewi, R. (2021). "Tawuran Pelajar dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak." *Hukum Online*. Diakses dari [<https://www.hukumonline.com>].

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Harsono, A. (2021). Penerapan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayati, F., & Saputro, S. A. (2020). "Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tawuran Pelajar." *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(2), 55-67.
- Laporan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (2021) mengenai penanganan kasus kekerasan anak di Indonesia.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, A. (2020). "Analisis Kebijakan Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar Menggunakan Senjata Tajam." *Kompasiana*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com>.
- Prasetyo, W., & Kurnia, T. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 145–160.
- Putra, A. (2018). "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Kriminologi*, 10(1), 14-29.
- Putri, S., Hadi, F., & Santoso, A. (2020). Studi Yuridis Normatif tentang Diversi pada Anak yang Menggunakan Senjata Tajam. *Jurnal Kriminologi dan Hukum Pidana*, 12(1), 78–92.
- Rachmawati, I. (2021). "Peran Restorative Justice dalam Penanganan Anak Pelaku Tawuran." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(3), 210-222.
- Rahman, A. (2021). Tantangan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak: Perspektif Rehabilitasi. *Jurnal Penegakan Hukum*, 15(4), 45–63.
- Setiawan, D. (2019). Analisis Pelaksanaan UU SPPA dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(3), 112–130.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Susanto, A. (2019). "Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 7(4), 34- 45.
- Widiastuti, N. (2020). Peran Lembaga Rehabilitasi Anak dalam Menangani Pelaku Tawuran. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 5(3), 98–115.